PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21052 Fax. (0532) 21052 E-Mail : *bappedakabkobar@yahoo.co.id*

SURAT TUGAS

Nomor : 841.5/ 735 /Bapp-I/2019

Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 080/12300/SJ Tanggal 07 Nopember 2019 Hal : Rakorpusda TPID 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Jalan Gatot Subroto KAV 18-20, Karet Semanggi, Jakarta

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : **HERMAYADI, S.Pi, M.Si**
   NIP : 19660614 199403 1 008
   Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
   Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian Bappeda Kab. Kotawaringin Barat
2. Nama : **SUDARWANTO, S.Sos**
   NIP : 19691229 200003 1 002
   Pangkat / Golongan : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Investasi Bappeda Kab.Ktw.Barat
3. Nama : **JALEHA, ST**
   NIP : 19790312 200501 2 013
   Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
   Jabatan : Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata

Untuk :
Menghadiri Rakorpusda TPID 2019 dengan tema " Sinergi Dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan Dan Kelancaran Distribusi Pangan Di Daerah" di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Jalan Gatot Subroto KAV 18-20, Karet Semanggi, Jakarta dan Konsultasi ke Badan Ekonomi Kreatif Indonesia di Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan selama 4 (Empat) hari, terhitung tanggal 20 - 23 November 2019
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 19 November 2019

a.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Sekretaris

BAPPEDA

Ir. DJOKO KUNTJORO
NIP. 19611123 199303 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Arsip

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada	:	Yth. Kepala Bappeda Kab. Kobar
Dari	:	1. Kepala sub bidang pertanian Bappeda Kab. Kobar 2. Kepala sub bidang Perdagangan, Industri dan Investasi Bappeda Kab Kobar 3. Kepala sub bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata Bappeda Kab Kobar
Tanggal	:	15 November 2019
Perihal	:	Kegiatan Menghadiri Rakorpusda TPID dengan Tema " Sinergi dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan dan Kelancaran Distribusi Pangan di Daerah" dan Konsultasi ke Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) di Jakarta.

I. Dasar :

1. Surat Undangan Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor : 080/123OC/ SJ tanggal 07 November 2019 perihal Rakorpusda TPID dengan Tema " Sinergi dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan dan Kelancaran Distribusi Pangan di Daerah".
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 841.5/235/Bapp-I/2019 tanggal 19 November 2019 a.n. Hermayadi, S.Pi,M.Si, Sudarwanto, S.Sos dan Jaleha, ST
3. Surat Perjalanan Dinas Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 094/603/Bapp-I/2019 Tanggal 19 November 2019 a.n. Hermayadi, S.Pi.,M.Si,
4. Surat Perjalanan Dinas Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 094/604/Bapp-I/2019 Tanggal 19 November 2019 a.n. Sudarwanto,
5. Surat Perjalanan Dinas Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 094/605/Bapp-I/2019 Tanggal 19 November 2019 a.n. Jaleha, ST

II. Peserta Kegiatan :

Peserta dan undangan dalam Undangan Rakorpusda TPID dengan Tema " Sinergi dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan dan Kelancaran Distribusi Pangan di Daerah". adalah :

1. Sekretaris Daerah selaku PHT (Ketua TPID Propinsi/Kabupaten) se Indonesia
2. Bank Indonesia (Perwakilan Daerah) se Indonesia
3. Bappeda Propinsi/Kabupaten se Indonesia
4. Sekretariat Daerah Propinsi/Kabupaten se Indonesia

III. Berdasarkan hasil rapat koordinasi TPID, dapat disimpulkan diinformasikan item penting yang mendasari pertemuan rapat koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rakornas kali ini mengusung tema Sinergi dan Inovasi dalam mendukung ketersediaan pasokan Dan kelancaran distribusi pangan di daerah yang dibuka secara resmi oleh Mendagri (diwakili oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri Muhammad Hudori).
   Pada kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa Peran TPID adalah upaya mengatasi resiko harga dengan Pemberian subsidi pada sektor produktif dan dengan melakukan operasi pasar serta serta meningkatkan kerja sama antar daerah juga merupakan upaya menekan biaya logistik di daerah.

2. Dr. Iskandar simorangkir, Deputi bidang ekonomi makro dan keuangan Kemenko Perekonomian, sbg Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat menyebutkan Inflasi nasional sampai dengan Oktober 2019 masih terjaga yaitu sekitar 3,2. Sementara diproyeksikan pada akhir tahun 2019 dapat tercapai di angka 2,2.

3. Dwi Edi Cahyono dari Departemen Kebijakan keuangan dan Moneter Bank Indonesia mengatakan langkah untuk menekan inflasi adalah dengan melakukan operasi pasar guna mengatasi berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti terbatasnya pasokan pangan. Tingginya ketergantungan produksi pangan terhadap faktor cuaca serta keterbatasan akses informasi harga juga sangat mempengaruhi inflasi.

4. Solusi lain untuk menekan inflasi adalah dengan meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan pasokan serta menekan logistik di daerah.

5. Perlu upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dengan tujuan penanganan inflasi di Daerah.

6. Mendukung sepenuhnya program–program presiden dalam hal singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan.
   Pemerataan pembangunan serta pelaksanaan pembangunan orientasinya tetap ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, anggaran yang sudah ada akan dilakukan akselerasi penggunaannya agar terasa manfaatnya bagi masyarakat secara luas.

IV. Waktu dan Tempat Kegiatan :

a. Hari / Tgl : Rabu - Kamis/ 20-21 November 2019
b. Pukul : (Jadwal Acara terlampir)
c. Tempat : Hotel Kartika Candra
   Jl. Gatot Subroto Kav 18-20 Karet Semanggi Jakarta.

V. Hasil konsultasi ke Badan Ekonomi kreatif Indonesia (BEKRAF) Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Badan Ekonomi kreatif Indonesia (BEKRAF) adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasikan kebijakan ekonomi kreatif di berbagai bidang. Mulai dari aplikasi dan game developer, arsitektur, seni rupa dan desain, kriya, kuliner, musik, hingga periklanan dan televisi.

   Saat ini keberadaan Bekraf masih belum ada kepastian / masa transisi apakah nanti melebur bersama Kementerian Pariwisata atau masih berdiri. Karena di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, nama Kementerian Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga koordinasi belum dapat secara maksimal.

2. Terkait masukan tentang kajian perencanaan tenis di bidang Ekonomi kreatif, di informasikan daerah yang sudah baik kemajuan Ekonomi kreatifnya adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

3. Pengembangan ekosistem usaha di Kreatif dilaksanakan pada 16 sub sektor. Prioitas pembangunan di bidang kepariwisataan Bekraf ada 3 sub sektor unggulan : fashion, kriya, kuliner.

4. Arah kebijakan dalam Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2020-2025.

   a. Pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif

      arah kebijakan : Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan, sumber daya manusia yang mendorong kontribusi Pelaku Ekonomi kreatif di seluruh sektor pembangunan

   b. Pengembangan Kota Kreatif untuk Menggati, Memanfaatkan, Menumbuhkembangkan, Mengelola Kreativitas serta Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, dan budaya untuk Mengembangkan potensi Lokal

      arah kebijakan: Pengembangan aktivitas kota kreatif yang berkelanjutan

   c. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Kreativitas dan Hak Kekayaan Intelektual

      arah kebijakan: Peningkatan apresiasi, pemanfaatan, dan konsumsi karya kreatif lokal oleh masyarakat Indonesia dan dunia

   d. Penyediaan Infrastruktur Teknologi yang Memadai dan Kompetitif untuk Mendukung Berkembangnya Kreativitas

      arah kebijakan: Perluasan infrastruktur dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung berkembangnya kreativitas dan inovasi di seluruh sektor pembangunan

   e. Pengembangan Kelembagaan yang Mendukung Ekosistem Kreativitas

      arah kebijakan: Pengembangan sistem kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan kreativitas

   f. Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif

      arah kebijakan: peningkatan dan perluasan dukungan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif

g. Peningkatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Warisan Budaya sebagai Bahan Baku bagi Usaha Ekonomi Kreatif

arah kebijakan: Pengembangan karya kreatif baru berbasis pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya

h. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

arah kebijakan: Peningkatan efektivitas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi usaha Ekonomi Kreatif

i. Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

arah kebijakan: Perluasan infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha Ekonomi Kreatif

j. Pengembangan Standardisasi dan Praktik Usaha yang Baik untuk Usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif

arah kebijakan: Pengembangan standardisasi dan praktik usaha yang baik (best practicel dari usaha Ekonomi Kreatif

k. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam dan di Luar Negeri

arah kebijakan: Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran karya kreatif di dalam negeri dan luar negeri

l. Penguatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
arah kebijakan: Penguatan regulasi iklim usaha bagi usaha Ekonomi Kreatif

VI. Waktu dan Tempat Kegiatan :

a. Hari / Tgl : Jumat/ 23 November 2019
b. Tempat : Wisma Antara Lt.7
Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jakarta Pusat
c. Kegiatan : Konsultasi ke Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) di Jakarta.

Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban, atas perhatian pimpinan diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,

1. HERMAYADI, S.Pi.,M.Si : .....
NIP. 19660614 199403 1 008
2. SUDARWANTO, S.Sos : .....
NIP. 19691229 200003 1 002
3. JALEHA, ST : .....
NIP. 19790312 200501 2 013